



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi merupakan bahasa bisnis utama dalam dunia pasar modal, dengan produk yang dihasilkan berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang dapat memberikan manfaat ekonomis bagi *stakeholders* (pemilik, manajemen, investor, pemerintah, dan lain-lain) dan tidak menimbulkan bias dalam proses pengambilan keputusan. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan globalisasi, muncul tuntutan akan adanya suatu standar yang dapat digunakan oleh banyak negara. Oleh karena itu muncullah *IFRS (International Financial Reporting Standard)*, suatu standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh *IASB (International Accounting Standard Board)*.

Akhir-akhir ini dunia akuntansi diramaikan dengan isu seputar *IFRS*, banyak negara maju dan berkembang yang sudah mengadopsi *IFRS*. Indonesia, sebagai bagian dari dunia internasional, memutuskan untuk terlibat dalam kemajuan dunia akuntansi dengan turut serta mengadopsi *IFRS*. Hal tersebut merupakan salah satu upaya agar Indonesia dapat disetarakan dalam kegiatan perekonomian internasional. Dengan mengikuti *IFRS*, berarti laporan keuangan akuntansi Indonesia telah menggunakan bahasa global sehingga mudah dipahami oleh pasar global. Perusahaan di Indonesia akan lebih mudah dalam melakukan transaksi lintas negara termasuk merger dan akuisisi.

Sebelum tahun 2008, Standar Akuntansi Keuangan Indonesia masih berpedoman pada *US GAAP (United States Generally Accepted Accounting Principles)*. Namun sekarang ini, *US GAAP* dinilai sudah tidak relevan lagi. Hal ini dikarenakan *GAAP* masih menganut asumsi *historical cost*. Dalam *historical cost*, nilai aset yang dicatat dalam laporan keuangan sebesar harga yang dikeluarkan saat memperoleh aset tersebut. Namun pada kenyataannya nilai aset setiap tahun dapat bertambah ataupun berkurang, tergantung pada sifat aset tersebut. Maka dari itu, asumsi mengenai *historical cost* sudah tidak bisa lagi

digunakan. Tentu saja hal ini akan menimbulkan bias dalam penafsiran laporan keuangan. Perbedaan nilai tersebut telah diantisipasi oleh *IFRS*. Konsep *historical cost* yang sudah tidak relevan tersebut diganti dengan konsep *fair value* (yang merupakan refleksi dari *market value*) yang lebih relevan. Menurut *IFRS*, nilai aset yang dicatat bukan lagi sebesar harga perolehannya, melainkan sebesar harga pasar dari aset tersebut.

Selain konsep *rule-based* milik *US GAAP* dengan *principle-based* milik *IFRS*, konsep *historical cost* dan *fair value* tersebut merupakan letak perbedaan yang paling mendasar antara *GAAP* dan *IFRS*. Laporan keuangan versi *GAAP* tak lain hanyalah sebagai catatan keuangan perusahaan di masa lalu. Sehingga pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan *ROA* dan *ROI* pun dapat menimbulkan bias. Akan sangat baik apabila kinerja perusahaan juga diukur dengan mempertimbangkan *fair value* agar mendekati nilai pasar yang sesuai. Jadi, laporan keuangan yang berpedoman pada *IFRS* akan lebih relevan dan aktual karena mempertimbangkan harga pasar. Walaupun harga pasar bukanlah satu-satunya indikator dalam pengambilan keputusan oleh *stakeholder*, setidaknya laporan keuangan yang dihasilkan oleh *IFRS* lebih mendekati keadaan yang sebenarnya (<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/03/pendahuluan-4/>).

Kondisi PSAK yang demikian akan menjadi penghalang dan hambatan bagi perusahaan di Indonesia dalam memasuki pasar global. Dengan konvergensi PSAK yang berbasis *IFRS*, salah satu standar akuntansi yang sama dan digunakan oleh banyak negara, investor akan makin terdorong untuk masuk dalam pasar modal Indonesia dikarenakan laporan keuangan yang dihasilkan memiliki kredibilitas tinggi, memuat pengungkapan yang lebih luas, memiliki informasi keuangan yang relevan dan akurat, dapat diperbandingkan dan yang lebih penting adalah laporan keuangan tersebut dapat diterima secara internasional serta mudah untuk dipahami.

Adopsi sistem akuntansi yang berbasis *IFRS* tersebut bukanlah pilihan bagi Indonesia, melainkan sebuah keharusan. Hal ini dikarenakan konvergensi *IFRS* adalah salah satu kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai anggota Forum G-20. G-20 merupakan forum yang terbentuk dengan perwakilan dari 85%

ekonomi dunia dan 2/3 penduduk dunia. Anggota G-20 terdiri atas Afrika Selatan, Jerman, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Cina, Korea Selatan, Amerika Serikat, Perancis, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Inggris, Rusia, Turki dan Uni Eropa.

G-20 sebagai suatu wadah tentu memiliki tugas. Sebenarnya negara-negara yang tergabung dalam G-20 tersebut telah mengembangkan cara-cara baru untuk menyokong perekonomian dunia, melalui program stimulus fiskal secara besar-besaran dan terkoordinasi, suntikan dana segar dari bank-bank sentral, kebijakan-kebijakan yang mendukung aktivitas perkreditan bank-bank, peningkatan kapasitas bantuan organisasi internasional secara besar-besaran, kepada negara-negara yang muncul sebagai kekuatan ekonomi baru maupun negara-negara berkembang.

Konvergensi *IFRS* tersebut merupakan hasil dari pertemuan para pemimpin negara forum G-20 di Washington DC, 15 November 2008 secara prinsip-prinsip G-20 yang dicanangkan sebagai berikut (Zamzami, 2011):

1. *Strengthening Transparency and Accountability*
2. *Enhancing Sound Regulation*
3. *Promoting Integrity in Financial Markets*
4. *Reinforcing International Cooperation*
5. *Reforming International Financial Institutions*

Pada kesempatan tersebut, Indonesia telah menandatangani kesepakatan G-20 untuk melaksanakan konvergensi *IFRS*, yang artinya standar akuntansi di Indonesia harus mengadopsi *IFRS*. Pada bulan Desember 2008, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mencanangkan konvergensi PSAK ke *IFRS* secara penuh pada tahun 2012. Sejak tahun 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) melaksanakan program kerja terkait dengan proses konvergensi tersebut sampai dengan tahun 2011.

Ditargetkan bahwa pada tahun 2012, seluruh PSAK tidak memiliki beda material dengan *IFRS* yang berlaku per 1 Januari 2009. Setelah tahun 2012, PSAK akan di-*update* secara terus-menerus seiring adanya perubahan pada *IFRS*. Bukan

hanya mengadopsi *IFRS* yang sudah terbit, DSAK-IAI juga bertekad untuk berperan aktif dalam pengembangan standar akuntansi dunia.

IFRS memang merupakan kesepakatan global standar akuntansi yang didukung oleh banyak negara dan badan-badan internasional di dunia. Popularitas *IFRS* di tingkat internasional semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kesepakatan G-20 di Pittsburg pada tanggal 24-25 Desember 2009, menyatakan bahwa otoritas yang mengawasi aturan akuntansi internasional harus meningkatkan standar global pada Juni 2011 untuk mengurangi kesenjangan aturan di antara negara-negara anggota G-20.

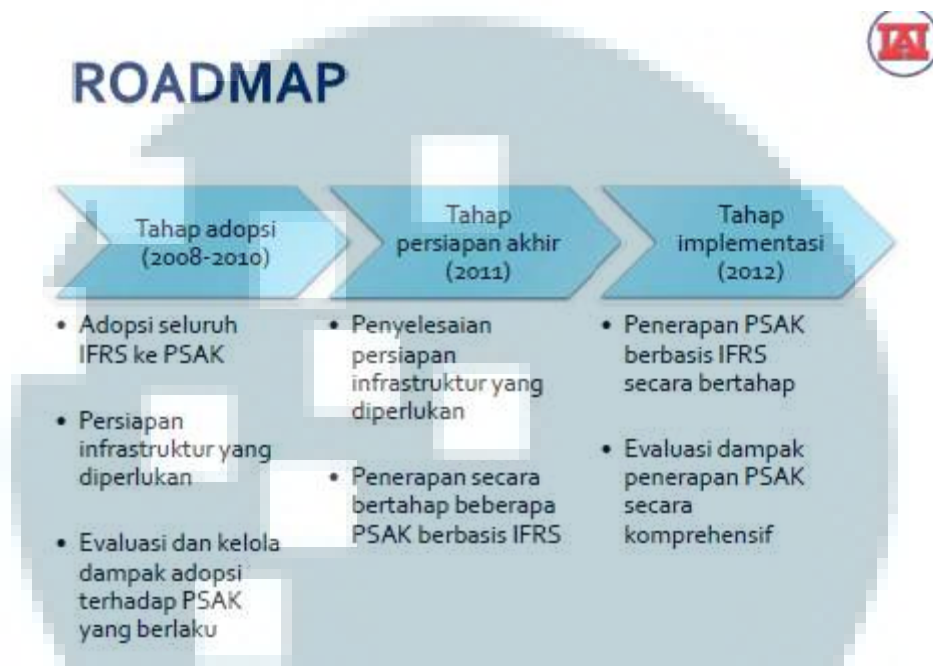
Melalui partisipasi global, *IFRS* memang diharapkan menjadi standar akuntansi berbasis teori dan prinsip yang memiliki kualitas tinggi. Penerapan standar akuntansi yang sama di seluruh dunia juga akan mengurangi masalah-masalah terkait daya banding (*comparability*) dalam pelaporan keuangan. Pihak yang paling diuntungkan dalam hal ini tentu saja adalah para investor dan kreditor trans-nasional serta badan-badan internasional.

Pada periode 2006-2008, merupakan konvergensi *IFRS* Tahap 1. Sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2010, buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru. Proses revisi dilakukan sebanyak enam kali yakni pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, 1 Juni 2006, 1 September 2007, dan versi 1 Juli 2009. Pada tahun 2006 dalam kongres IAI X di Jakarta ditetapkan bahwa konvergensi penuh *IFRS* akan diselesaikan pada tahun 2008. Target ketika itu adalah taat penuh dengan semua standar *IFRS* pada tahun 2008. Namun dalam perjalanannya ternyata tidak mudah. Sampai akhir tahun 2008, jumlah *IFRS* yang diadopsi baru mencapai 10 standar *IFRS* dari total 33 standar (Zamzami, 2011).

IAI pada tanggal 23 Desember 2008 lalu telah mencanangkan dilaksanakannya program konvergensi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ke *International Financial Reporting Standards (IFRS)* secara gradual pada tahun 2012. Sejak saat itu, DSAK IAI menyusun langkah-langkah dan *roadmap* untuk mencapai sasaran merevisi seluruh SAK secara bertahap agar pada 2012 secara

signifikan telah sesuai dengan *IFRS* versi 1 Januari 2009. Berikut adalah *Roadmap* konvergensi *IFRS* di Indonesia:

Gambar 1.1 *Roadmap* Konvergensi *IFRS*



Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia

Selama kurun waktu empat tahun, DSAK-IAI telah melakukan adopsi *IFRS* secara bertahap. Sejak tahun 2009 sampai dengan Oktober 2012, DSAK-IAI sudah mengadopsi 35 PSAK dari 37 *IFRS* serta sudah mengadopsi 19 Interpretasi SAK dari 27 *SIC* dan *IFRIC*. Selama tahun 2009 lalu, dalam jangka waktu kurang lebih enam bulan DSAK-IAI berhasil menetapkan 19 produk DSAK: terdiri dari 10 PSAK, 5 Interpretasi SAK, dan 4 Pernyataan Pencabutan SAK (PPSAK).

Pada tahun 2010, 7 PSAK dan 3 interpretasi SAK serta 1 Buletin Teknis kembali disahkan. Pada tahun 2011, 16 PSAK berhasil disahkan, beserta 8 ISAK, 5 PPSAK dan 3 buletin teknis. *Exposure Draft* PSAK dan ISAK saat ini masih ada yang diproses untuk mendapat masukan dari publik.

Menurut DSAK, pengadopsian *IFRS* dapat dibedakan menjadi lima tingkatan:

1. *Full Adoption*, pada tingkat ini suatu negara mengadopsi seluruh *IFRS* dan menerjemahkan *word by word*.

2. *Adapted*, mengadopsi seluruh *IFRS* tetapi disesuaikan dengan kondisi di suatu negara.
3. *Piecemeal*, suatu negara hanya mengadopsi sebagian nomor *IFRS*, yaitu nomor standar atau paragraf tertentu
4. *Referenced*, standar yang diterapkan hanya mengacu pada *IFRS* tertentu dengan bahasa dan paragraf yang disusun sendiri oleh badan pembuat standar
5. *Not adoption at all*, suatu negara sama sekali tidak mengadopsi *IFRS*.

Indonesia berada pada tingkatan “*Adapted*”, yakni mengadopsi seluruh *IFRS* namun disesuaikan terlebih dahulu dengan kondisi negara Indonesia. Keputusan DSAK saat ini adalah mendekatkan PSAK dengan *IAS/IFRS* dengan membuat dua strategi:

1. Strategi selektif. Strategi ini dilakukan dengan tiga target yaitu; mengidentifikasi standar-standar yang paling penting untuk diadopsi seluruhnya dan menentukan batas waktu penerapan standar yang diadopsi, melakukan adopsi standar selebihnya yang belum diadopsi sambil merevisi standar yang telah ada, dan target terakhir adalah melakukan konvergensi proses penyusunan standar dengan *IASB*.
2. Strategi *dual standard*. Strategi ini dilakukan dengan menerjemahkan seluruh *IFRS* sekaligus dan menetapkan waktu penerapannya bagi *listed companies*. Sedangkan bagi *non-listed companies* tetap menggunakan PSAK yang telah ada.

Perubahan konseptual yang dialami oleh dunia akuntansi di Indonesia ini tentu akan berdampak bagi perkembangan ilmu akuntansi di Indonesia. Menurut Ketua Tim Implementasi *IFRS*-IAI, Dudi M. Kurniawan (Kompas, 6 Mei 2010) bahwa dengan mengadopsi *IFRS*, Indonesia akan mendapatkan tujuh manfaat sekaligus. *Pertama*, meningkatkan standar akuntansi keuangan (SAK). *Kedua*, mengurangi biaya SAK. *Ketiga*, meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan. *Keempat*, meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan. *Kelima*, meningkatkan transparansi keuangan. *Keenam*, menurunkan biaya modal peluang

penghimpunan dana melalui pasar modal. *Ketujuh*, meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan.

Dalam praktiknya, penerapan standar baru ini tidaklah semudah yang dibayangkan. Banyak pelaku bisnis yang mengeluhkan kesulitan dalam penerapan standar baru tersebut di perusahaanya. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendukung penerapan *IFRS* ini juga tidak murah. Sebagai contoh, biaya investasi untuk *training IFRS* berkisar antara 3 juta sampai 5 juta per orang. Untuk perusahaan berskala menengah, tentu biaya tersebut bukan jumlah yang sedikit.

Menurut Ketua DSAK-IAI, Rosita Uli Sinaga, terdapat beberapa tantangan utama dalam mengadopsi *IFRS* ini, yakni pemahaman semua pemangku kepentingan atas dampak konvergensi *IFRS* 2012, perbedaan peraturan perundangan dengan SAK, beda pengaturan pengukuran dan pengakuan laba, aset dan liabilitas yang semakin besar antara akuntansi dan pajak, infrastruktur ketersediaan data untuk pengukuran aset dan liabilitas berbasis *fair value*, perbedaan interpretasi atas SAK, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami SAK berbasis *IFRS*.

Pada tahun 2012 ini, Indonesia sudah memasuki tahap implementasi konvergensi *IFRS*. Namun, Indonesia tetap melakukan tahap adopsi dan tahap persiapan akhir konvergensi *IFRS*. Hal ini dikarenakan proses konvergensi *IFRS* berlangsung secara terus-menerus. Oleh karena itu, DSAK, pemerintah, auditor, akademisi, regulator dan para pemangku kepentingan lainnya harus bekerja sama dalam proses konvergensi dan implementasi SAK berbasis *IFRS* ini. Dengan begitu, dunia akuntansi Indonesia akan lebih maju seiring dengan perkembangan standar akuntansi tersebut dan perusahaan-perusahaan Indonesia pun akan dapat bersaing secara global.

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Maksud dan tujuan kerja magang yang dilaksanakan di Ikatan Akuntan Indonesia adalah agar mengetahui dan terlibat secara langsung dalam proses konvergensi *IFRS* yang sedang berlangsung di Indonesia. Keterlibatan tersebut ditunjukkan dengan membantu DSAK-IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan

Akuntan Indonesia), khususnya Tim Implementasi SAK yang tercakup dalam Divisi Teknis untuk menyempurnakan PSAK berbasis *IFRS* yang telah diadopsi dan juga membantu proses konvergensi *IFRS* tahap lanjut. Dikarenakan proses adopsi *IFRS* per 1 Januari 2009 telah selesai dengan dikeluarkannya SAK per 1 Juni 2012, maka dari itu, yang perlu dilakukan sekarang adalah penyempurnaan SAK tersebut dengan meng-*update* secara terus-menerus seiring adanya perubahan pada *IFRS*.

Dengan adanya program kerja magang ini, juga diharapkan dapat mempererat hubungan baik yang sudah terjalin antara Universitas Multimedia Nusantara dengan Ikatan Akuntan Indonesia dan tidak menutup adanya kerja sama lainnya antara kedua institusi ini.

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Program kerja magang ini dilaksanakan dari tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan 24 September 2012. Kerja magang ini ditujukan untuk membantu pekerjaan di Divisi Teknis, Ikatan Akuntan Indonesia yang bertempat di Graha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta Pusat. Kerja magang ini dilaksanakan setiap hari kerja, yakni dari hari Senin hingga Jumat, pukul 08.30-17.00 WIB. Namun selama bulan puasa, terdapat perubahan jam kerja, yakni pukul 08.00-16.00 WIB.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Sebelum melaksanakan program kerja magang ini, berbagai prosedur perlu dilakukan guna mendapat izin pelaksanaan program ini. Berdasarkan buku panduan magang Universitas Multimedia Nusantara tahun 2010, prosedur-prosedur tersebut adalah:

- 1) Tahap pengajuan
 - a) Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan Kerja Magang (Form KM-01) sebagai acuan pembuatan Surat Pengantar Kerja Magang yang ditujukan kepada perusahaan yang dimaksud yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan

formulir KM-01 dan formulir KM-02 dapat diperoleh dari program studi;

- b) Surat Pengantar dianggap sah apabila dilegalisir oleh Ketua Program Studi;
- c) Program Studi menunjuk seorang dosen *full time* pada Program Studi yang bersangkutan sebagai pembimbing Kerja Magang;
- d) Diperkenankan mengajukan usulan tempat kerja magang kepada Ketua Program Studi;
- e) Menghubungi calon perusahaan tempat Kerja Magang dengan dibekali surat pengantar kerja magang;
- f) Jika permohonan untuk memperoleh kesempatan magang ditolak, mengulang prosedur dari poin a,b,c, dan d, dan izin baru akan diterbitkan untuk mengganti izin lama. Jika permohonan diterima, melaporkan hasilnya kepada Koordinator Magang;
- g) Dapat mulai melaksanakan Kerja Magang apabila telah menerima surat balasan bahwa diterima kerja magang pada perusahaan yang dimaksud yang ditujukan kepada Koordinator Magang;
- h) Apabila telah memenuhi semua persyaratan Kerja Magang, akan memperoleh: Kartu Kerja Magang, Formulir Kehadiran Kerja Magang, Formulir Realisasi Kerja Magang dan Formulir Laporan Penilaian Kerja Magang.

2) Tahap pelaksanaan

- a) Sebelum melakukan Kerja Magang di perusahaan, diwajibkan menghadiri perkuliahan Kerja Magang yang dimaksudkan sebagai pembekalan. Perkuliahan pembekalan dilakukan sebanyak 3 kali tatap muka. Jika tidak dapat memenuhi ketentuan kehadiran tersebut tanpa alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan, akan dikenakan pinalti dan tidak diperkenankan melaksanakan praktik kerja magang di perusahaan pada semester berjalan, serta harus mengulang untuk mendaftar kuliah pembekalan magang pada periode berikutnya.

- b) Pada perkuliahan Kerja Magang, diberikan materi kuliah yang bersifat petunjuk teknis kerja magang dan penulisan laporan kerja magang, termasuk didalamnya perilaku mahasiswa di perusahaan. Adapun rincian materi kuliah adalah sebagai berikut:

Pertemuan 1: Sistem dan prosedur kerja magang, perilaku dan komunikasi mahasiswa dalam perusahaan.

Pertemuan 2: Struktur organisasi perusahaan, pengumpulan data (sistem dan prosedur administrasi, operasional perusahaan, sumber daya); analisis kelemahan dan keunggulan (sistem, prosedur dan efektivitas administrasi serta operasional, efisiensi penggunaan sumber daya, pemasaran perusahaan, keuangan perusahaan)

Pertemuan 3: Cara penulisan laporan, ujian kerja magang dan penilaian, cara presentasi dan tanya jawab.

- c) Bertemu dengan dosen pembimbing untuk pembekalan teknis di lapangan. Melaksanakan kerja magang di perusahaan di bawah bimbingan seorang karyawan tetap di perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan kerja magang yang selanjutnya disebut sebagai Pembimbing Lapangan. Dalam periode ini, belajar bekerja dan menyelesaikan tugas yang diberikan Pembimbing Lapangan. Untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, berbaur dengan karyawan dan staf perusahaan agar ikut merasakan kesulitan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja magang. Jika dikemudian hari ditemukan penyimpangan-penyimpangan (melakukan kerja magang secara fiktif), terhadap dapat dikenakan sanksi diskualifikasi dan sanksi lain sebagaimana aturan universitas, serta diharuskan mengulang proses kerja magang dari awal.
- d) Harus mengikuti semua peraturan yang berlaku di perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan kerja magang.
- e) Bekerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan sesuai dengan bidang studinya. Menuntaskan tugas yang diberikan oleh

pembimbing lapangan di perusahaan atas dasar teori, konsep, dan pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. Mencoba memahami adaptasi penyesuaian teori dan konsep yang diperolehnya di perkuliahan dengan terapan praktisnya.

- f) Pembimbing lapangan memantau dan menilai kualitas dan usaha kerja magang.
- g) Sewaktu menjalani proses kerja magang, koordinator kerja magang beserta dosen pembimbing kerja magang memantau pelaksanaan kerja magang dan berusaha menjalin hubungan baik dengan perusahaan. Pemantauan dilakukan baik secara lisan maupun tertulis.

3) Tahap Akhir

- a) Setelah kerja magang di perusahaan selesai, menuangkan temuan serta aktivitas yang dijalankannya selama kerja magang dalam laporan kerja magang dengan bimbingan dosen pembimbing kerja magang.
- b) Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur laporan kerja magang Universitas Multimedia Nusantara.
- c) Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mengajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan kerja magang harus mendapat pengesahan dari dosen pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi. Menyerahkan laporan kerja magang kepada pembimbing lapangan mengisi formulir penilaian pelaksanaan kerja magang (Form KM-06).
- d) Pembimbing lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang (Form KM-04) terkait dengan kinerja selama melaksanakan kerja magang.
- e) Pembimbing lapangan memberikan surat keterangan perusahaan yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan studinya.

- f) Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pembimbing lapangan di perusahaan atau instansi untuk dikirim secara langsung kepada koordinator magang atau melalui yang bersangkutan dalam amplop tertutup untuk disampaikan kepada koordinator magang.
- g) Setelah melengkapi persyaratan ujian kerja magang, koordinator kerja magang menjadwalkan ujian kerja magang.
- h) Menghadiri ujian kerja magang dan mempertanggung-jawabkan laporannya pada ujian kerja magang.

UMMN